



PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*, TIPE INDUSTRI, DAN KEPEMILIKAN PUBLIK PADA PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*

Ni Komang Sri Cristi Okta Dewi¹ Eka Ardhani Sisdyani²

Article history:

Submitted: 20 Desember 2021

Revised: 7 Januari 2022

Accepted: 18 Januari 2022

Keywords:

Corporate responsibility; social corporate mechanism; governance industrial type; public ownership; stakeholder theory

Abstract

This study aims to determine the effect of corporate governance mechanisms, type of industry, and public ownership of companies on CSR disclosure through the sustainability reports of SOEs listed on the IDX for the 2017-2019 period. The population in this study were 26 state-owned companies. Determination of the number of samples using purposive sampling technique with 3 criteria so as to obtain 18 samples that meet the three criteria. The data analysis used is multiple linear analysis. The results of this study indicate that corporate governance mechanisms, type of industry, and company public ownership have a positive effect on CSR disclosure. This means that the better the corporate governance mechanism and the greater the ownership of public shares which is also influenced by the type of industry in the company, the wider CSR disclosure can be made. The results of this study can also theoretically confirm the Stakeholder Theory which plays an important role in the company's sustainability.

Kata Kunci:

Corporate responsibility; social mekanisme mekanisme corporate governance; tipe industri; kepemilikan publik; teori stakeholder

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh mekanisme *corporate governance*, tipe industri, dan kepemilikan publik perusahaan pada pengungkapan CSR melalui laporan keberlanjutan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan BUMN. Penentuan jumlah sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan 3 kriteria sehingga didapatkan 18 sampel yang memenuhi ketiga kriteria tersebut. Data analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda (*multiple linear regression*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance*, tipe industri, dan kepemilikan publik perusahaan berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. Hal ini berarti semakin baik mekanisme *corporate governance* dan semakin besar kepemilikan saham publik yang dipengaruhi juga dengan tipe industri pada perusahaan tersebut, maka semakin luas pengungkapan CSR dapat dilakukan. Hasil penelitian ini juga secara teoritis dapat mengkonfirmasi Teori *Stakeholder* yang berperan penting bagi keberlanjutan perusahaan.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
Email: cristiokta2@gmail.com

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Iswandika (2014) adalah tanggungjawab perusahaan dalam yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengutamakan kepentingan pemegang saham tetapi juga pemangku kepentingan. Albuquerque (2019) menyebutkan bahwa CSR digambarkan dalam bentuk investasi dalam rangka peningkatan keuntungan jangka panjang di atas margin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengungkapan CSR perusahaan dalam laporan tahunan bersifat wajib (*mandatory disclosure*). Dalam penelitian ini pengungkapan CSR diukur dengan metode *content analysis* yang diterbitkan oleh 18 sampel BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara periode 2017 sampai 2019. Penelitian tentang pengungkapan CSR telah banyak dilakukan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Pramesti & Budiasih (2020), Oktariani (2013), Priantana & Yustian (2011), dan Djuitaningsih (2012).

Menurut Keputusan Menteri BUMN KEP-117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 mengenai penerapan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN, *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai proses terstruktur yang digunakan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Penelitian ini menggunakan mekanisme *corporate governance*, yaitu variabel proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit dalam mengukur pengaruh mekanisme *corporate governance* pada pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Iswandika *et al.* (2014) menunjukkan bahwa variabel proporsi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Djuitaningsih (2012) dan Priantana & Yustian (2011) menemukan hasil sebaliknya karena institusi yang menanamkan modalnya pada perusahaan belum mempertimbangkan masalah tanggungjawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi pada sebuah perusahaan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Priantana & Yustian (2011) menunjukkan variabel lain yaitu variabel ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif pada pengungkapan CSR, yang mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris serta dilengkapi dewan komisaris independen, maka pengungkapan CSR yang dapat dilakukan menjadi lebih luas. Hasil berbeda ditemukan oleh Pasaribu & Kowanda (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Handajani *et al.* (2009) menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh pada pengungkapan CSR, yakni komite audit melakukan perannya dengan baik dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak. Berbeda dengan penelitian Djuitaningsih (2012) dan Pasaribu & Kowanda (2015) menunjukkan hasil yang berlawanan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bermaksud memahami pengaruh mekanisme *corporate governance* pada pengungkapan CSR.

Tipe industri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tipe industri *high profile* dan tipe industri *low profile*. Hasil penelitian oleh Widiastuti *et al.* (2018) dan Mandaika & Salim (2017) menyimpulkan bahwa variabel tipe industri berpengaruh positif pada pengungkapan CSR dengan persentase data pada industri *high profile* lebih besar dibandingkan industri *low profile*. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Karina & Yuyetta (2013) yang menyatakan hasil yang berbeda karena dalam data penelitian persentase industri *low profile* lebih besar daripada industri *high profile*. Kepemilikan saham oleh publik/individual menurut Hanafi & Halim (2012) merupakan jumlah saham perusahaan

yang dimiliki oleh public (individu) sebesar lima persen diluar saham manajemen dan tidak berafiliasi dengan perusahaan. Penelitian Wakidi & Siregar (2011) dan Sembiring (2003) menemukan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR, tetapi Pramesti & Budiasih (2020) dan Puspitasari (2009) dalam penelitiannya menemukan hasil sebaliknya, karena kepemilikan publik berperan dalam mempengaruhi perusahaan dan memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam melakukan pengungkapan aktivitas sosialnya.

Ukuran perusahaan adalah skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut Hilmi & Ali (2008) ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, dan jumlah tenaga kerja. Yuliana (2008) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, variabel ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol yang diukur dengan logaritma natural dari total aset. Hal ini dilakukan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini (Pramesti & Budiasih, 2020). Pemilihan sektor BUMN didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori *stakeholders*. Dalam teori ini dinyatakan bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pengungkapan Csr oleh perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat penjelasan akuntabilitas CSR terhadap *stakeholders* (Omran dan Ramdhony, 2015). Teori ini mengasumsikan bahwa dalam mempertahankan eksistensi perusahaan diperlukan adanya dukungan dari *stakeholders* sehingga mereka berhak mengetahui segala informasi terkait perusahaan baik informasi keuangan ataupun non-keuangan (Purwanto, 2011).

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian terlebih dahulu maka diajukan hipotesis sebagai berikut: H1: Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. H2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. H3: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. H4: Ukuran komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. H5: Tipe industri *high profile* berpotensi melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas daripada industri *low profile*. H6: Kepemilikan publik berpengaruh positif pada pengungkapan CSR

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu mekanisme *corporate governance* (proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit), tipe industri, kepemilikan public, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap pengungkapan CSR yang diukur dengan metode *content analysis*. Penelitian dilakukan dengan menganalisis 26 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 dengan metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 18 sampel dan selanjutnya diuji menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Adapun persamaan regresinya sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e \dots\dots\dots(1)$$

Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Tipe Industri, dan Kepemilikan Publik Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Ni Komang Sri Cristi Okta Dewi dan Eka Ardhani Sisdyani

Keterangan:

Y	: Corporate Social Responsibility Disclosure Indeks
α	: Kontanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$: Koefisien Regresi
X ₁	: Proporsi Kepemilikan Institusional
X ₂	: Ukuran Dewan Komisaris
X ₃	: Proporsi Dewan Komisaris Independen
X ₄	: Ukuran Komite Audit
X ₅	: Tipe Industri
X ₆	: Kepemilikan Publik
X ₇	: Ukuran Perusahaan
e	: error

Sebelum melakukan uji regresi berganda maka perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah model penelitian dapat dilanjutkan atau tidak. Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah itu dilakukan uji hipotesis yang dapat diukur dengan uji koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (uji F), dan uji signifikansi parameter individual (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INST (X1)	54	0,1	0,87	0,6576	0,09689
DKOM (X2)	54	3,00	9,00	5,2407	1,71492
KIND (X3)	54	0,17	0,67	0,4578	0,12365
KAUD (X4)	54	2,00	6,00	3,3889	1,07135
TIBE (X5)	54	0,00	1,00	0,4444	0,50157
KSP (X6)	54	3,43	49,00	32,5111	13,28465
SIZE (X7)	54	6,69	14,09	9,7231	1,91170
CSR (Y)	54	0,55	0,64	0,5944	0,02212
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 maka dapat dijelaskan deskripsi masing-masing variabel sebagai berikut: Variabel CSR yang diukur dengan CSRDI memiliki nilai minimum sebesar 0,55 dan nilai maksimumnya sebesar 0,64 dengan nilai *mean* sebesar 0,5944. Pengungkapan CSR terkecil dari 18 BUMN sampel penelitian adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) dan pengungkapan CSR terbesar adalah Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Nilai standar deviasi untuk

CSR sebesar 0,02212 yang berarti terjadi penyimpangan nilai CSRDI pada nilai *mean* (rata-rata) sebesar 0,02212.

Proporsi kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,51 dan nilai maksimumnya sebesar 0,87 dengan nilai *mean* sebesar 0,6576. Proporsi kepemilikan institusional terkecil dari 18 BUMN sampel penelitian adalah Semen Indonesia (Persero) (SMGR) dan proporsi kepemilikan institusional terbesar adalah Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) periode 2018. Nilai standar deviasi untuk proporsi kepemilikan institusional sebesar 0,09689 yang berarti terjadi penyimpangan nilai proporsi kepemilikan institusional pada nilai *mean* sebesar 0,09689.

Ukuran dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimumnya sebesar 9 dengan nilai *mean* sebesar 5,2407. Ukuran dewan komisaris terkecil dari 18 BUMN sampel penelitian adalah Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) periode 2018, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS), dan Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) periode 2018 & 2019, sedangkan ukuran dewan komisaris terbesar adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Nilai standar deviasi untuk ukuran dewan komisaris sebesar 1,71492 yang berarti terjadi penyimpangan nilai ukuran dewan komisaris pada nilai *mean* sebesar 1,71492.

Proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,17 dan nilai maksimumnya sebesar 0,67 dengan nilai *mean* sebesar 0,4578. Proporsi dewan komisaris independen terkecil dari 18 BUMN sampel penelitian adalah Semen Indonesia (Persero) (SMGR) dan proporsi dewan komisaris independen terbesar adalah Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Nilai standar deviasi untuk proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,12365 yang berarti terjadi penyimpangan nilai proporsi dewan komisaris independen pada nilai *mean* sebesar 0,12365.

Ukuran komite audit memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimumnya sebesar 6 dengan nilai *mean* sebesar 3,3889. Ukuran komite audit terkecil dari 18 BUMN sampel penelitian adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), Aneka Tambang (Persero) (ANTM), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), dan Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS), sedangkan ukuran komite audit terbesar adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Nilai standar deviasi untuk ukuran komite audit sebesar 1,07135 yang berarti terjadi penyimpangan nilai ukuran komite audit pada nilai *mean* sebesar 1,07135.

Tipe industri yang diukur dengan *dummy* variabel memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimumnya sebesar 1 dengan nilai *mean* sebesar 0,4444. Tipe industri terkecil dari 18 BUMN sampel penelitian adalah BUMN yang termasuk dalam *industries low profile* dan tipe industri terbesar adalah BUMN yang termasuk dalam *industries high profile*. Nilai standar deviasi untuk tipe industri sebesar 0,50157 yang berarti terjadi penyimpangan nilai tipe industri pada nilai *mean* sebesar 0,50157.

Kepemilikan publik memiliki nilai minimum sebesar 3,43 dan nilai maksimumnya sebesar 49 dengan nilai *mean* sebesar 32,5111. Kepemilikan publik terkecil dari 18 BUMN sampel penelitian adalah dan kepemilikan publik terbesar adalah. Nilai standar deviasi untuk kepemilikan publik sebesar 13,28465 yang berarti terjadi penyimpangan nilai kepemilikan publik pada nilai *mean* sebesar 13,28465.

Ukuran perusahaan yang diukur dengan *logaritma natural of total assets* memiliki nilai minimum sebesar 6,69 dan nilai maksimumnya sebesar 14,09 dengan nilai *mean* sebesar 9,7231. Ukuran perusahaan terkecil dari 18 BUMN sampel penelitian adalah Elnusa Tbk dan ukuran perusahaan terbesar adalah Waskita Karya (Persero) Tbk. Nilai standar deviasi untuk ukuran perusahaan sebesar 13,28465 yang berarti terjadi penyimpangan nilai ukuran perusahaan pada nilai *mean* sebesar 13,28465.

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang dibuat terdistribusi normal atau tidak, yang dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Hasil pengujian diperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,099 lebih besar dari *level of significant* (tingkat signifikansi), yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Pendekteksian dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas. Hasil pengujian diperoleh bahwa variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu mekanisme *corporate governance* (diukur dengan proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, komite audit), tipe industri, dan kepemilikan publik dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol memiliki nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas atau tidak ada korelasi antar variabel bebas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variabel dalam model regresi dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa variabel mekanisme *corporate governance* (diukur dengan proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, komite audit), tipe industri, dan kepemilikan publik lebih besar dari 0,05 pada *absolute residual*, maka model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), dengan menggunakan uji *run test*. Hasil pengujian diperoleh bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,054 lebih besar dari 0,050, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 2.
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,854	0,730	0,689	0,01233

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,689, memiliki arti bahwa 68,9 persen variasi variabel dependen (terikat), yaitu pengungkapan CSR (Y) mampu dijelaskan dan dipengaruhi secara bersama-sama oleh variasi dari variabel independennya (bebas), yaitu proporsi kepemilikan institusional (X₁), ukuran dewan komisari (X₂), proporsi dewan komisaris independen (X₃), ukuran komite audit (X₄), tipe industri (X₅), dan kepemilikan saham publik (X₆), sedangkan sisanya 31,1 persen dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi.

Berdasarkan hasil uji kelayakan model (uji F) menunjukkan hasil perhitungan F sebesar 17,782 dan tingkat signifikansi F sebesar 0,000. Tingkat signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independent (bebas) dikatakan berpengaruh pada variabel dependen (terikat).

Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Tipe Industri, dan Kepemilikan Publik Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Ni Komang Sri Cristi Okta Dewi dan Eka Ardhani Sisdyani

Tabel 3.
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	0,019	7	0,003	17,782	0,000
	<i>Residual</i>	0,007	46	0,000		
	<i>Total</i>	0,026	53			

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	<i>(Constant)</i>	0,381	0,030		12,765	0,000
	INST (X ₁)	0,051	0,023	0,226	2,189	0,034
	DKOM (X ₂)	0,001	0,001	0,110	1,044	0,002
	KIND (X ₃)	0,074	0,015	0,370	4,845	0,000
	KAUD (X ₄)	0,005	0,002	0,258	2,396	0,021
	TIPE (X ₅)	0,022	0,005	0,488	4,578	0,000
	KSP (X ₆)	0,001	0,000	0,396	3,233	0,002
	SIZE (X ₇)	0,011	0,001	0,963	8,895	0,000

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2021

Hipotesis pertama (H₁) menyatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi proporsi kepemilikan institusional sebesar 0,051 dengan nilai signifikansi sebesar 0,034 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional BUMN yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. Dengan demikian, hipotesis pertama (H₁) dalam penelitian diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Iswandika *et al.* (2014) dan Gozali (2014) yang menyatakan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh pada pengungkapan. Hasil ini juga mendukung teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa kegiatan operasional perusahaan tidak hanya untuk kepentingan pribadi namun juga bermanfaat bagi *stakeholder* dan juga pemilik institusional. Semakin besar kepemilikan institusional maka pengungkapan CSR yang dilakukan akan semakin tinggi.

Hipotesis kedua (H₂) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi ukuran dewan komisaris sebesar 0,001 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris BUMN yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. Dengan demikian, hipotesis kedua (H₂) dalam penelitian diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Priantana & Yustian (2011), Oktariani (2013) dan Iswandika *et al.* (2014) yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh pada pengungkapan CSR. Hasil ini juga mendukung teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dengan *stakeholder*, yang berarti bahwa semakin besar

dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada perusahaan khususnya dewan komisaris yang berada dalam perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan CSR.

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,074 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen BUMN yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Priantana & Yustian (2011) dan Saraswati & Hadiprajitno (2013) yang menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh pada pengungkapan CSR. Hasil ini juga mendukung teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa dukungan yang diberikan para *stakeholder* khususnya dukungan dewan komisaris independen, maka akan semakin luas pengungkapan CSR perusahaan.

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi ukuran komite audit sebesar 0,005 dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit BUMN yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Handajani *et al.* (2009) dan Iswandika *et al.* (2014) yang menyatakan ukuran komite audit berpengaruh pada pengungkapan CSR. Hasil ini juga mendukung teori *stakeholder* menyatakan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan *stakeholder* sehingga semakin luas pengungkapan CSR yang dilakukan. Mekanisme *corporate governance* khususnya komite audit dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pelaksanaan pengungkapan CSR sehingga akan meningkatkan kepercayaan public terhadap perusahaan serta meminimalisir peluang manajemen untuk melakukan kecurangan.

Hipotesis kelima (H_5) menyatakan bahwa tipe industri *high profile* berpotensi melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas daripada industri *low profile*. Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi tipe industri sebesar 0,022 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga berpengaruh positif signifikan. Hal ini menunjukkan tipe industri dalam hasil penelitian BUMN berpengaruh positif, artinya tipe industri *high profile* berpotensi melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas daripada industri *low profile*. Dengan demikian, hipotesis kelima (H_5) dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti *et al.* (2018) dan Mandaika & Salim (2013) dengan menyatakan bahwa tipe industri berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan CSR. Hasil ini mendukung teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab kepada *stakeholder* dengan melakukan pengungkapan CSR. Dalam menanggapi tanggungjawab tersebut akan mendorong BUMN tipe industri *high profile* lebih banyak mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya. Pengaruh positif mengindikasikan bahwa BUMN tipe industri *high profile* memiliki tingkat sensitivitas, tingkat risiko politik dan tingkat kompetensi yang tinggi terhadap lingkungan sehingga mendapatkan sorotan lebih dari masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya.

Hipotesis keenam (H_6) menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi kepemilikan publik sebesar 0,001 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik pada BUMN yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. Dengan demikian, hipotesis keenam (H_6) dalam penelitian diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pramesti & Budiasih (2020) dan Puspitasari (2009) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh pada pengungkapan CSR. Hasil ini juga mendukung teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa kepemilikan saham publik

dapat berpengaruh terhadap perusahaan dalam pengungkapan aktivitas sosialnya sehingga perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* termasuk kebutuhan akan informasi pengungkapan kegiatan sosial perusahaan (Pramesiti & Budiasih, 2020). Hal ini juga menunjukkan semakin besar kepemilikan saham oleh masyarakat/publik maka akan semakin besar pula ketertarikan masyarakat/publik terhadap perusahaan tersebut khususnya dalam informasi mengenai pengungkapan CSR dalam konteks mensejahterakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit, maka akan semakin luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Menggunakan analisis regresi linear berganda pengaruh tipe industri memiliki arah positif yang signifikan pada pengungkapan CSR. Hal tersebut menyatakan bahwa tipe industri, yaitu *high profile industries* berpotensi melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas daripada *low profile industries*. Menggunakan analisis regresi berganda kepemilikan saham publik memiliki pengaruh positif yang signifikan pada pengungkapan CSR. Hal tersebut menyatakan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin luas pengungkapan CSR. Oleh sebab itu pengungkapan CSR dan informasi mengenai perusahaan akan semakin ingin diketahui oleh publik.

Berdasarkan hasil analisis dari simpulan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Bagi pihak perusahaan diharapkan mampu mengembangkan terbitan laporan keberlanjutan secara berturut-turut agar informasi tersebut menjadi bermanfaat bagi perusahaan sebagai evaluasi khususnya dalam pengambilan keputusan mengenai pengungkapan CSR. Bagi pihak investor diharapkan memperhatikan hal-hal yang dapat memengaruhi pengungkapan CSR, terutama dalam melakukan penanaman modal pada perusahaan terbuka khususnya BUMN yang terdaftar di BEI sehingga meminimalisir resiko dan diharapkan menjadi pertimbangan agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan BUMN. Bagi pihak pemerintah penting untuk memfasilitasi dengan lebih baik lagi dalam pelaksanaan CSR oleh korporasi, tanpa membatasi kepentingan perusahaan terkait CSR. Bentuk fasilitasi pemerintah dapat berupa tambahan atau perbaikan dalam perijinan pelaksanaan CSR, penyediaan data, sosialisasi mengenai CSR kepada masyarakat dan melakukan *sharing* program. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih periode penelitian maupun sektor perusahaan yang sesuai dengan laporan yang digunakan, seperti laporan keberlanjutan maupun laporan penting lainnya sehingga sampel penelitian yang digunakan akan menghasilkan penelitian yang lebih tepat dan akurat. Peneliti selanjutnya juga memastikan ketersediaan data agar tidak menemui kendala dalam melakukan penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengikutsertakan BUMN yang tidak terdaftar di BEI sebagai sampel penelitian dengan menganalisis isi laporan PKBL yang menggunakan laporan triwulanan sebagai jalan dari kurangnya akses data dalam perusahaan tertutup dan menggunakan indikator yang paling sesuai dengan penelitian yang diteliti.

REFERENSI

Djuitaningsih, T. (2012). Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *Media Riset Akuntansi*, 2(2), 187–211

- Gozali, E. O. D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR DISCLOSURE) Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 8(2), 159–170
- Hanafi, M., & Halim, A. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIE YKPN
- Handajani, L., Sutrisno, & Chandrarin, G. (2009). The Effects of Earnings Management and Corporate Governance Mechanism on Corporate Social Responsibility Disclosure: An Empirical Study at Public Companies in Indonesia Stock Exchange. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 12(3), 233–248
- Iswandika, R., Murtanto, & Sipayung, E. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 1(2), 1–18.
- Karina, L. A. D., & Yuyetta, E. N. A. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–12
- Mandaika, Y., & Salim, H. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, Tipe Industri dan Finansial Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar. *Jurnal Akuntansi*, 8, 181–201
- Oktariani, W. (2013). Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 8(2), 100–117
- Omran, M. A., & Ramdhony, D. (2015). Theoretical Perspectives on Corporate Social Responsibility Disclosure : A Critical Review. *Intenational Journal of Accounting and Financial Reporting*, 5(3), 36–55
- Pasaribu, R., & Kowanda, D. (2015). Pengaruh Earning Management dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Emiten Manufaktur Di BEI. *Jurnal Riser Manajemen Dan Bisnis*, 10(2), 97–121
- Pramesti, A. A. W. L., & Budiasih, I. G. A. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Publik pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 1006–1018. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i04.p17>
- Priantana, R. D., & Yustian, A. (2011). Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 4(1), 65–78.
- Purwanto, A. (2011). Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1), 12–29
- Puspitasari, A. D. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia*. Universitas Diponegoro Semarang
- Saraswati, R., & Hadiprajitno, B. (2013). Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, 1–11
- Sembiring, E. R. (2003). Kinerja Keuangan, Political Visibility, Ketergantungan Pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1, 249–259
- Wakidi, R. H., & Siregar, H. S. (2011). Pengaruh Sisi Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ekonomi*, 14(4), 180–190
- Widiastuti, H., Utami, E. R., & Handoko, R. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, Growth, dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2015). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 107–117
- Yuliana, R., Purnomosidhi, B., & Sukoharsono, E. G. (2008). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Reaksi Investor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5, 245–276